

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menitikberatkan kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri sudah tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu bentuk gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasari atas asas kekeluargaan dan dianggap sebagai salah satu penopang jalannya perekonomian negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 adalah sebagai berikut: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Dengan harapan koperasi mampu memajukan perekonomian Indonesia.

Maka dari itu untuk mencapai tujuan koperasi sangatlah diperlukan pengelolaan yang benar dan professional. Dalam kegiatannya, koperasi harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil yang diperoleh khususnya laporan pengurus kepada anggotanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan tiap akhir tahun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi tidak hanya ditujukan kepada anggota namun digunakan juga oleh para pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi. Maka dari itu dalam pengelolaannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar koperasi mendapatkan hasil yang maksimal guna mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas (IAI 2009:2).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya usaha koperasi yang terus meningkat, tuntutan yang diberikan kepada koperasi pun semakin besar karena koperasi harus mengelola usahanya secara baik dan juga professional terutama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karena kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kedalam kendala yang dihadapi oleh koperasi antara lain, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi. (Ade Lita Lestari 2018). Oleh karena itu, untuk mewujudkan koperasi yang baik dan dapat dikelola secara professional adalah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang bersifat terbuka, transparan dan akuntabel, diterima dan dapat dipercaya oleh para anggota juga masyarakat luas pada

umumnya. Berhasil tidaknya suatu koperasi bergantung pada bagaimana para anggota dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin pada segi peningkatan keuangan koperasi yang disusun dalam laporan keuangan.

Agar laporan keuangan dapat mudah dipahami dan dibaca oleh para penggunanya, maka diperlukan adanya pedoman yang sesuai untuk mengatur proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Dengan adanya pedoman yang dapat menyusun laporan keuangan, maka akan memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan kedepannya. Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi dan dapat digunakan pula sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada koperasi. Laporan keuangan pada dasarnya yaitu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Koperasi sebagai badan usaha harus menyajikan laporan keuangan yang diperlukan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal (Dasuki, 2018b).

Standar laporan keuangan yang digunakan di Indonesia memiliki empat pilar, antara lain yaitu PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK-Syariah, dan SAP. Pada awalnya penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh koperasi diatur dalam PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi, namun pernyataan tersebut kini telah dicabut berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia

Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 dan telah digantikan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditetapkan.

SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 lalu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non Publicly Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK independen yang tidak mengacu pada SAK umum dan terutama menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, serta bentuk pengaturan akuntansi lebih sederhana yang relatif tidak berubah selama bertahun-tahun (Ikatan Akuntan Indonesia). Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap itu meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2009:17-18).

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP juga ditambahkan dengan penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012. Peraturan ini mengatur perhitungan sisa hasil usaha dan pembagiannya, rincian sumber modal koperasi dalam neraca, pemisahan beban koperasi ke dalam beban operasional, beban perkoperasian dan beban operasional lainnya dalam laporan sisa hasil usaha. Perhitungan sisa hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi, penyajian akhir dari perhitungan sisa hasil usaha disebut dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). Dalam menyusun laporan keuangan yang wajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya komponen laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Dimana dalam laporan laba rugi tercermin kinerja keuangan yang mencakup pendapatan dan beban. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba persaham (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI]:2013) Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Pengakuan beban dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi. Salah satu tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan tertib. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI] mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) mendefinisikan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas, entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, oleh karena itu pendapatan seharusnya diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima oleh entitas. Pada umumnya pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto, sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antar pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota (Pandiangan, 2021) Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI] beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Maka dari itu beban merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Pengakuan beban dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi. Beban harus diperhatikan dan dicatat secara tepat karena akan menentukan laba suatu badan usaha. Beban akan timbul karena adanya aktivitas badan usaha untuk

memperoleh pendapatan. Ketepatan penacatatan beban tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan oleh suatu badan usaha.

Koperasi Karyawan atau yang biasa disingkat menjadi KOPKAR PT. Pindad adalah sebuah koperasi yang memiliki 3 unit usaha, diantaranya adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha umum, dan unit usaha paket borongan kebersihan. Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad berada di Kota Bandung dengan Badan Hukum No. 24C/BH/KWK-10/VIII/1995. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad sudah menerapkan SAK-ETAP sebagai acuan untuk melakukan pencatatan keuangannya (akuntansi).

Tabel 1.1 Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha	2022	2021
Pendapatan	Rp 32.317.525.319	Rp 32.444.355.502
Beban Pokok Pendapatan	Rp 22.068.193.300	Rp 19.181.772.510
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp 10.249.332.019	Rp 13.262.582.992

Sumber: Laporan Laba Rugi RAT KOPKAR PT. Pindad 2021-2022

Tabel 1.2 Beban Operasional

Beban Operasional	2022	2021
Beban Administrasi dan Umum	Rp 5.861.513.529	Rp 9.349.504.691
Jumlah Beban Operasional	Rp 5.861.513.529	Rp 9.349.504.691
Sisa Hasil Usaha Operasional	Rp 4.387.818.490	Rp 3.913.078.301

Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2022	2021
Pendapatan lain-lain	Rp 525.637.405	Rp 461.613.352
Beban lain-lain	Rp 963.360.118	Rp 473.002.898
Jumlah Pendapatan dan Beban lain-lain	Rp (437.722.712)	Rp (11.389.546)

Sumber: Laporan Laba Rugi RAT KOPKAR PT. Pindad 2021-2022

Pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad dalam penyajian laporan keuangannya ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penyajian laporan keuangannya, dimana beban yang disajikan tidak disajikan secara rinci melainkan digabungkan meenjadi beban operasional dan beban lain-lain.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Anggelina Chrisdayanti Salindeho, Lintje Kalangi, dan , Sonny Pangerapan dengan judul penelitian Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK-ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan KSP Duta Sejahtera belum sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan, perlakuan akuntansi beban sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sutri Handayani pada tahun 2020 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mulya Sukodadi Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KSP Estu Mulya Sukodadi Lamongan belum sepenuhnya menggunakan SAK ETAP , dilihat dari

pengakuan pendapatan yang ternyata belum diakui secara akrual, tetapi untuk pengakuan beban pada koperasi ini semuanya sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Didasari dengan data yang telah dikumpulkan maka penelitian ini akan diberi judul **“Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban Berbasis SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan dan fenomena yang telah disampaikan di latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan PT. Pindad.
2. Bagaimana kesesuaian pengukuran pendapatan dan beban berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan PT. Pindad.
3. Bagaimana kesesuaian penyajian pendapatan dan beban berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan PT. Pindad.
4. Bagaimana kesesuaian pengungkapan pendapatan dan beban berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan PT. Pindad.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memahami, mempelajari, memperoleh data, dan menganalisa bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad, Kota Bandung yang berkaitan dengan standar akuntansi koperasi terutama pada laporan keuangan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad.
2. Mengetahui kesesuaian pengukuran pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad.
3. Mengetahui kesesuaian penyajian pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad.

4. Mengetahui kesesuaian pengungkapan pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Pindad.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah ilmu, serta manfaat mengenai teori-teori dalam akuntansi koperasi khususnya dalam pengelolaan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan beban yang sesuai dengan SAK-ETAP. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan bacaan dan referensi yang bisa bermanfaat bagi para peneliti lainnya yang berkaitan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi tambahan terhadap praktisi koperasi dalam menyajikan laporan

keuangannya dan juga sebagai bahan evaluasi untuk menjalankan aktivitas kedepannya agar lebih menerapkan standar akuntansi yang berlaku

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman juga pengalaman langsung secara nyata dalam penelitian dengan topik menganalisis laporan keuangan koperasi berbasis SAK-ETAP.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengetahuan terapan khususnya pada laporan keuangan berbasis standar akuntansi yang berlaku untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami standar akuntansi serta dapat memajukan kualitas koperasi di masa yang akan datang.